

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdurrahman. (1983). *Masalah Hak-Hak atas Tanah dan Pembebasan Tanah di Indonesia* (cetakan ke). Alumni.

Hutagalung, A. S. (2005). *Tebaran Pemikiran Seputar Masalah Hukum Tanah*. Lembaga Pemberdayaan Hukum Indonesia.

Harsono, B. (2008). *Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan.

Idham. (2004). *Konsolidasi Tanah Perkantoran Dalam Perspektif Otonomi Daerah*. PT. Alumni.

Kusumaatmadja, M. (2002). *Konsep-Konsep Dalam Pembangunan*. PT Alumni.

Mertokusumo, S. (2007). *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. liberty.

Purbacaraka, P. (1978). *Perihal Kaedah Hukum*. penerbit alumni.

Sanusi, A. (1977). *Pengantar Ilmu Hukum dan pengantar Tata Hukum Indonesia*. tarsito.

Soekanto, S. (1982). *Kesadaran dan Kepatuhan Hukum*. CV.Rajawali.

Soekanto, S. (2014). *Pengantar Penelitian Hukum*. Universitas Indonesia.

Soemitro, R. H. (1990). *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Ghalia Indonesia.

Soerodjo, I. (2003). *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Di Indonesia*. Arkola.

Wirjono, P. (1980). *Hukum Perdata Tentang Hak Atas Benda*. PT Intermasa.

A.P Parlindungan. (n.d.). *Beberapa Konsep Tentang Hak - Hak atas tanah*.

Majalah CSIS.

Ardiwilaga, R. R. (1962). Hukum Agraria Indonesia. N.V Masa Baru.

Eddy, R. (2004). Politik Pertanahan Nasional Sampai Orde Reformasi. P.T.

Alumni.

ibid. (n.d.).

Mertokusumo, S. (1988). Hukum dan Politik Agraria. Karunika.

Santoso, U. (2017). Perolehan Hak Atas Tanah. Kencana.

Notonagoro. (1974). *Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia*.

CV Pancuran Tujuh.

B. Peraturan Perundang – Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria
3. Kitab Undang – Undang Hukum Perdata
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah
5. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional
6. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang Badan pertanahan Nasional Republik Indonesia
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

8. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Penetapan Hak Pengelolaan Dan Hak Atas Tanah
9. PMNA/KBPN Nomor 9 Tahun 1999

C. Sumber lain

1. Werdi H, P. (2018). Peningkatan Hak Guna Bangunan Yang Habis Masa Berlakunya Menjadi Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Hukum Dan Kenotariatan*, 2(2).
2. Isneni Hakima, R., Pujiwati, Y., & Rubiatic, B. (2018). Hak Prioritas Dalam Perolehan Tanah Hak Guna Bangunan Yang Habis Jangka Waktunya Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria Dan Keputusan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional . *Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan Fakultas Hukum Unpad, Volume 1*,
3. Putera Husein, F., Abubakar, L., & Lubis Anisa, N. (2018). Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku. *Kepastian Hukum Penerapan Jangka Waktu Perpanjangan Hak Guna Bangunan Yang Berakhir Masa Berlakunya Sebagai Obyek Hak Tanggungan Sebelum Perjanjian Pokok Berakhir Dikaitkan*

Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku, Volume 2,

4. A.P Parlindungan. (n.d.). Beberapa Konsep Tentang Hak - Hak atas tanah. *Majalah CSIS*.